

BAB V

KESIMPULAN

Indonesia adalah negara tetangga yang penting bagi Australia. Sebagai negara kepulauan dengan jumlah populasi yang besar pula, Indonesia terletak di antara Samudra India dan Samudra Pasifik. Dengan posisi geografis yang menghubungkan Australia dengan negara-negara di Benua Asia. Indonesia menempati posisi strategis dalam kebijakan pertahanan dan luar negeri Australia. Takdir geografis tidak pernah dapat ditolak, kecuali kedua bangsa harus mampu menciptakan suatu kemitraan yang sehat, yang dapat menjamin kestabilan kawasan mereka. Hubungan kemitraan yang sehat memang dibangun oleh kedua negara, namun dalam perkembangannya hubungan tersebut diwarnai oleh nuansa-nuansa yang memperburuk hubungan tersebut. Perbedaan-perbedaan budaya, dan prioritas-prioritas kebijakan politik dalam dan luar negeri kedua negara sangat mempengaruhi ketidak sehatan hubungan di antara kedua negara tetangga tersebut.

Hubungan Australia dengan Indonesia sebagai sebuah bangsa diawali menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dukungan Pemerintah Australia terhadap kemerdekaan Indonesia yang telah dijajah Belanda selama 350 tahun, paling dirasakan tahun 1947-1950. Sebenarnya hubungan keduanya sudah lama terjalin yaitu sejak masa pelayaran dan perdagangan, tetapi masih dalam bentuk hubungan antarsuku. Dimana hubungan itu dijalin oleh Suku Aborigin Australia dengan Suku Bugis di Makasar, Indonesia.

Pada mulanya, Australia tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam persoalan kolonial di Indonesia dan berusaha memberikan simpati kepada usaha-usaha menyelesaikan persoalan kemerdekaan yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda dan para nasionalis Indonesia. Segera setelah para nasionalis Indonesia, di bawah pimpinan Soekarno dan Mohammad Hatta, menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kaum buruh galangan kapal Australia mewujudkan dukungan dan simpati mereka dengan melarang semua kapal Belanda memasuki perairan Australia. Di dunia internasional, Australia juga ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yaitu di PBB.

Setelah penandatanganan Perjanjian Linggarjati pada 15 November 1946 dan berlanjut atas kemerdekaan Indonesia secara de facto oleh Belanda terhadap Indonesia. Australia kemudian juga ikut mengecam agresi militer Belanda pada 20 Juli 1947 yang berusaha merebut kembali kekuasaan wilayah Republik Indonesia di Jawa. Sejak itu Australia memasuki secara langsung ke dalam persoalan kemerdekaan Indonesia. Wakil-wakil Australia di PBB mengusulkan dan mengajukan negaranya untuk bertindak sebagai arbitrase, namun usul tersebut ditolak, kemudian Australia dipilih oleh RI untuk menjadi anggota Komisi Jasa-jasa Baik.

Pergantian pemerintahan di Australia dari Partai Buruh kepada koalisi Partai Liberal-Country, membawa perubahan pula dalam hubungan Australia dengan Indonesia. Kebijakan luar negeri Australia yang dipengaruhi oleh situasi Perang Dingin membawa Australia kepada sikap yang pro kepada kekuatan-kekuatan barat. Memperjelas sikap pro-baratnya, Pemerintah Australia menyatakan

keinginan agar Belanda menguasai Irian Barat. Dengan demikian, antara tahun 1950-1962 merupakan titik terendah dalam hubungan Australia dengan Indonesia. Indonesia mengambil langkah keras dalam masalah Irian Barat, di mana kesatuan-kesatuan militer dikerahkan untuk menguasai Irian Barat. Sikap agresif Presiden Soekarno tersebut lebih meyakinkan Australia mengenai pentingnya Irian Barat berada dalam kekuasaan Belanda. Akhirnya, Australia memang tidak dapat berbuat apa-apa setelah Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia pada tahun 1962, dan menjadi bagian RI melalui Pepera (penentuan pendapat rakyat) di bawah supervisi PBB sehingga hubungan kedua negara ini menjadi dingin.

Hubungan keduanya diperparah dengan adanya politik konfrontasi yang didengungkan oleh Presiden Soekarno terhadap Malaysia pada tahun 1963-1965. Pemerintah Australia di bawah pimpinan PM Menzies mengirim pasukannya ke Malaysia dan Singapura dalam rangka menghalangi kebijakan konfrontasi tersebut.

Hubungan Australia dengan Indonesia mulai membaik sehubungan dengan pergantian kekuasaan di Indonesia, menyusul percobaan kudeta oleh PKI pada tahun 1965, yang dikenal dengan Peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S/PKI). Pemerintahan Orde Baru disambut baik oleh Pemerintahan Australia, sehingga Australia segera mengakui kepemimpinan Orde Baru, karena Indonesia memperlihatkan sikap anti-komunis yang keras dan menjalankan kebijakan luar negeri yang pro-barat.

Pada tahun 1972-1975, Australia berada di bawah Pemerintahan Partai Buruh dengan Perdana Menteri Gough Whitlam. Gough Whitlam dilahirkan di

Kew, sebuah suburbia Melbourne. Sebelum menjadi Perdana Menteri dan bergabung dengan Partai Buruh, selama Perang Dunia II ia berdinas sebagai penerbang di Skuadron No. 13 RAAF Angkatan Udara Australia, mencapai pangkat letnan penerbang. Ia menyelesaikan studinya setelah perang dan diterima di pengadilan New South Wales pada 1947.

Partai Buruh Australia (ALP/Australian Labour Party) adalah salah satu partai politik besar di Australia yang istimewa. Partai buruh tidak pernah berkoalisi dengan partai-partai mana pun, baik ketika memerintah maupun ketika berperan sebagai oposisi. Partai Buruh pernah mengalami masa-masa gawat. Partai ini mengalami tiga kali perpecahan besar, yaitu pada tahun 1916, tahun 1929, dan tahun 1955. Gough Whitlam berhasil mengangkat kepercayaan diri partainya dengan memenangkan pemilu 1972.

Keistimewaan lainnya adalah bahwa dalam periode-periode kekuasaannya Partai Buruh selalu menghadapi keadaan–keadaan internasional yang sulit. Kebijakan-kebijakan Partai Buruh, yang banyak menyentuh masalah-masalah internasional yang sulit waktu itu, selalu ditentang oleh oposisi dan menjatuhkan pemerintahannya, namun citra Australia di dunia internasional semakin membaik.

Pemilihan Gough Whitlam sebagai pemimpin Partai Buruh pada tahun 1967 menandai fase baru dalam politik Australia. Whitlam mencoba untuk membuat Partai Buruh sebagai pilihan pemerintahan alternatif yang dapat dipercaya dan sebagai sebuah organisasi politik yang dapat menarik anggota dari berbagai kelompok yang didukung secara kebiasaan oleh Partai Liberal para pekerja kerah putih, para professional dan masyarakat bisnis lainnya.

Pemerintahan Whitlam yang berkuasa sejak 1972 ini, berusaha untuk mengadaptasi politik luar negeri Australia dengan keadaan dunia internasional yang sedang berubah. Whitlam melihat apa yang dilakukan oleh Pemerintahan Liberal sebelumnya tidak lagi sesuai dengan realita dunia. Whitlam berusaha membawa Australia lebih mandiri dan memiliki citra internasional yang baik. Whitlam menghapuskan kebijakan *containment policy* dan *defense in depth* yang dijalankan pada pemerintahannya. Whitlam lebih mengacu pada konsep “perimbangan kekuatan” dan strategi curahan gandum.

Tindakan Whitlam segera sebagai Perdana Menteri adalah menarik penasehat militer Australia yang terakhir dari Vietnam Selatan, menghentikan semua bantuan militer untuk negara dan menghapuskan wajib militer. Whitlam membangun penuh hubungan diplomatik dengan Jerman Timur dan Cina.

Whitlam juga berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan Jakarta. Usaha ini dilakukan dalam rangka memperbaiki citra Australia di mata Dunia Ketiga. Karena letak geografisnya, bagaimanapun Indonesia selalu masuk dalam perhitungan analis strategi-pertahanan Australia.

Hubungan baik yang dilakukan Australia terhadap Indonesia ini dibuktikan dengan Kunjungan Perdana Menteri Australia yang baru, Gough Whitlam, ke Indonesia dalam bulan Februari 1973 yang merupakan perlawatannya yang pertama ke luar negeri sebagai Perdana Menteri, Whitlam berkunjung ke Indonesia dari tanggal 20 sampai dengan 25 Februari 1973. Di mana dua belas bulan sebelumnya, dalam bulan Februari 1972, Presiden Soeharto telah mengunjungi Australia.

Gough Whitlam juga pernah mengeluarkan pernyataan bahwa hubungan antara Australia dan Indonesia selalu kuat yang dinyatakan dalam jamuan kenegaraan di Istana Negara pada tanggal 20 Februari 1973. Perdana Menteri Gough Whitlam juga menambahkan bahwa pemerintahannya menghendaki hubungan-hubungan itu menjadi semakin kuat.

Pemerintahannya juga mendukung konsep ASEAN tentang suatu zona damai, kemerdekaan dan netralitas di Asia Tenggara. Whitlam juga telah menyatakan kesediaan pemerintahannya untuk memberikan bantuan melatih angakat bersenjata dan dalam fasilitas teknik serta pengiriman peralatan. Dalam realisasi hubungan keduanya, Indonesia menerima bagian yang terbesar dari bantuan resmi Australia. Dalam bantuan keuangan hingga 30 Juni 1973, tahun ketiga dan terakhir dari suatu program bantuan selama tiga tahun yang berjumlah \$A 53,8 juta, pengeluaran bantuan Australia di Indonesia telah berjumlah \$A 23 juta. Dalam tahun-tahun belakangan ini, program-program bantuan Australia di Indonesia telah meliputi bantuan untuk proyek-proyek dan bantuan teknik, program bantuan dalam bentuk Devisa Kredit, bahan makanan dan barang-barang lainnya, dan pendidikan.

Selain itu, ada bantuan untuk suplai peralatan untuk kereta api, pengangkutan yang telah selesai rehabilitasi armada bus Jakarta. Komitmen ini telah meliputi pemberian onderdil-onderdil dan penyediaan suatu tim yang terdiri atas montir dan pembuat badan bus dari australia, yang telah merehabilitasi bus-bus yang ada dan juga telah memasang bus-bus baru yang disediakan oleh Inggris.

Program rehabilitasi jalan raya selama dua belas bulan, untuk mendemonstrasikan teknik-teknik konstruksi, dan lain sebagainya.

Hubungan keduanya sempat tercoreng akibat masalah Timor Timur. Di mana masalah ini diawali dengan adanya pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Portugis mengenai masalah dekolonisasi daerah-daerah jajahannya. Kebijaksaan tersebut diawali dengan adanya kudeta militer di Portugal pada tanggal 25 April 1974. Menurut Menteri Seberang Lautan Portugis, wilayah Timor Timur lebih baik untuk bergabung dengan wilayah NKRI. Namun, Presiden Soeharto menegaskan bahwa Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial terhadap Timor Timur ini. Menurut penilaian Indonesia, merdeka penuh bagi Timor Timur tidaklah rasional, karena ada dua faktor yang tidak dipenuhi.

Dalam masalah Timor Timur, PM Whitlam segera mengadakan pertemuan dengan Presiden Soeharto di Yogyakarta pada September 1974. Dalam pertemuan ini, mereka membahas masalah Timor Timur untuk pertama kalinya. Dalam pernyataannya, PM Whitlam melihat Timor Timur tidak akan menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri, yang akan menjadi ancaman kestabilan di kawasan tersebut. Whitlam juga menghendaki agar rakyat Timor Timur diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan masa depannya sendiri. Hal ini berarti PM Whitlam juga tidak ingin adanya negara lain, dalam hal ini Indonesia, untuk mengambil alih wilayah itu secara paksa.

Namun terjadi pertentangan dalam politik Timor Timur, di mana Partai Fretelin tidak menghendaki untuk bergabung dengan Indonesia dan menginginkan untuk merdeka. Sementara Partai Apodeti, UDT, Trabalista, dan Kota sepakat

untuk bergabung dengan Indonesia. Situasi menjadi hangat dan tegang, dan pada akhirnya Fretilin meneror rakyat Timor Timur, sehingga Partai Apodeti, UDT, Trabalista, dan Kota, serta dibantu oleh para sukarelawan dari tentara Indonesia berusaha untuk melepaskan teror tersebut. Sehingga terjadi bentrokan dan ada lima wartawan Australia yang tewas saat meliput kejadian, yang dikabarkan dibunuh oleh tentara Indonesia. Keadaan ini memicu reaksi keras dari Australia dan negara-negara lainnya. Ketika Indonesia menduduki dengan cara kekerasan, masyarakat Australia menolak cara tersebut. Bahkan Pemerintahan Buruh bersikap kritis terhadap tindakan Indonesia dan Australia mengkritik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Melihat kemungkinan timbulnya gangguan terhadap kestabilan dan keamanan kawasan bila Timor Timur menjadi negara merdeka, Pemerintah Indonesia secara resmi mengambil alih kekuasaan di wilayah tersebut, serta menggabungkan Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia pada tahun 1976. Akhirnya, Pemerintah Australia mengakui secara *de jure* penggabungan Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia pada Januari 1978.

Pada bulan Agustus 1973, Whitlam membuat alasan-alasan untuk dua pembubaran yang dia putuskan untuk diterima. Kemudian, pada bulan April 1974, Senat digunakan sebagai kekuatan menahan persediaan dan sebagai kekuatan ganda. Bukanlah pernyataan yang berlebihan untuk dikatakan bahwa sejak masa jabatan pemerintahan Whitlam keuangan sangat boros pada negara. Pada tahun 1973-1974 total pembayaran persemakmuran untuk negara meningkat sampai 50 persen, dan 30 persen lainnya pada tahun 1974-1975.

Menuju akhir tahun 1974 terjadi kemerosotan yang serius dalam bidang ekonomi. Pengangguran meningkat dan popularitas Whitlam menurun secara dramatis. Tekanan mulai muncul dari pihak oposisi untuk memaksa pembubaran ganda lebih lanjut. Pada tahun 1975 para Senator dari Partai Buruh yang meninggal atau mengundurkan diri digantikan oleh senator-senator yang anti-Partai Buruh.

Krisis terus berkembang ketika Whitlam menolak saran untuk pembubaran ganda Parlemen dan Senat yang tetap dilakukan. Pada tanggal 11 November 1975, Guberur Jenderal, Sir John Kerr, memecat Whitlam dan menugaskan pemimpin oposisi, Malcolm Fraser, sebagai Perdana Menteri sementara sampai pemilihan umum dapat dilaksanakan. Pemilihan umum dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1975, yang menghasilkan kemenangan suara untuk Partai Liberal yang dipimpin oleh Fraser.